

Digital Transparency dalam Akuntansi Sektor Publik: Peran Open Data dan E-Government di Indonesia

Abdurrahman Maulana Yusuf ^{1*}, Cornelius Rante Langi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

abdurrahmanmaulana@feb.unmul.ac.id^{1*}

Menerima: 01 Mei 2026 | Diterima: 23 Mei 2026 | Diterbitkan: 17 Juni 2026

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran digital transparency dalam akuntansi sektor publik di Indonesia melalui pemanfaatan open government data dan e-government sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa keterbukaan data keuangan tidak cukup dinilai dari ketersediaan akses, tetapi perlu dilihat dari kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keterpahaman informasi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan keuangan, serta portal data terbuka pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses publik terhadap data keuangan pemerintah telah meningkat, tetapi akuntabilitas belum optimal karena data yang disajikan masih kurang lengkap, belum selalu disertai penjelasan kontekstual, dan belum sepenuhnya dipublikasikan secara tepat waktu. Temuan inti penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan administratif dan keterbukaan substantif, yaitu ketika data tersedia secara digital tetapi belum cukup mudah dipahami dan digunakan untuk pengawasan publik. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya pemerintah menyajikan data keuangan publik secara lebih terstruktur, informatif, mutakhir, dan mudah diolah agar fungsi akuntansi sektor publik sebagai sarana pertanggungjawaban dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: *Digital Transparency; Akuntansi Sektor Publik; Open Government Data; E-Government; Akuntabilitas.*

Abstract

This study aims to examine the role of digital transparency in public sector accounting in Indonesia through the utilization of open government data and e-government as instruments to strengthen public accountability. The novelty of this research lies in emphasizing that the openness of financial data should not be assessed solely based on access availability, but also on the quality, completeness, timeliness, and comprehensibility of information for the public. A qualitative descriptive approach was employed, analyzing policy documents, financial reports, and government open data portals. The findings indicate that while public access to government financial data has improved, accountability remains suboptimal because the data presented is often incomplete, lacks sufficient contextual explanations, and is not always published in a timely manner. The core finding highlights a gap between administrative transparency and substantive transparency, where data is digitally available but not yet easily understandable or usable for public oversight. Practically, this study implies that the government should present public financial data in a more structured, informative, timely, and user-friendly manner to enhance the effectiveness of public sector accounting as a tool for accountability.

Keywords: *Digital Transparency; Public Sector Accounting; Open Government Data; E-Government; Accountability.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami transformasi yang signifikan di berbagai bidang, terutama dalam teknologi dan pengelolaan data. Perubahan ini turut mempengaruhi sektor publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu perubahan besar adalah berkembangnya *digital transparency*, yaitu keterbukaan informasi pemerintah melalui sarana digital yang memungkinkan publik memperoleh akses terhadap data, proses, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara lebih terbuka dan mudah dijangkau (Matheus et al., 2023). Sebelumnya, transparansi sektor publik umumnya berfokus pada penyajian laporan keuangan yang bersifat periodik, namun dengan adanya kemajuan teknologi informasi, transparansi kini berkembang ke arah yang lebih terbuka dan dinamis, dimana masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Konsep ini penting karena menyentuh aspek akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan efisien (Octavio & Urumsah, 2024). Meskipun regulasi dan sistem terkait transparansi digital sudah diterapkan di Indonesia, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan portal data terbuka, efektivitas penerapan sistem ini masih menjadi perdebatan. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan kualitas dan aksesibilitas data yang diberikan, serta rendahnya literasi digital di kalangan sebagian besar masyarakat (OECD, 2019).

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran *digital transparency* dalam akuntansi sektor publik, dengan fokus pada penerapan *open government data* dan *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas di Indonesia. Penelitian ini mengisi gap dalam literatur yang ada terkait penerapan transparansi digital dalam akuntansi sektor publik Indonesia yang masih terbatas, khususnya dalam mengintegrasikan konsep *digital governance* ke dalam kebijakan publik di tingkat daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana pemerintah dapat mengelola dan mempublikasikan data secara lebih efektif sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. *Digital governance*, sebagai konsep yang lebih luas, menjadi kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. *Digital governance* mengacu pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam sektor publik. Konsep ini telah berkembang pesat dalam literatur yang membahas hubungan antara teknologi informasi dan pengelolaan pemerintahan (Sadat, 2025). Konsep ini lebih dari sekadar penggunaan teknologi untuk menyajikan data; ia mencakup cara-cara data tersebut dikelola, dipublikasikan, dan dimanfaatkan untuk tujuan kebijakan publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2018).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana penerapan *digital transparency* dalam akuntansi sektor publik di Indonesia dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik? Kedua, apa peran *open government data* dalam memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran negara? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan transparansi digital ini, baik dari sisi infrastruktur, kualitas data, maupun literasi digital masyarakat? Sebagai tujuan utama penelitian ini, penulis ingin mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas transparansi digital dalam sektor publik, serta mengusulkan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada, dengan menggunakan pendekatan teori *digital governance* yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas transparansi di sektor publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagai bagian dari konsep teori yang mendukung, *digital transparency* dan *open data* menjadi dua hal penting yang mendasari penelitian ini. Konsep *digital transparency*, seperti yang dijelaskan oleh (Heald, 2006), berfokus pada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, literatur yang lebih baru mengenai *e-government* dan *open data* juga menekankan pentingnya kualitas data dan partisipasi masyarakat dalam memastikan transparansi digital berjalan efektif (Setyanto et al., 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip *open data* yang diusung oleh berbagai negara, dimana data publik disediakan secara terbuka dan bebas untuk dimanfaatkan oleh siapa saja. Teori ini tidak hanya membahas soal akses terhadap data, tetapi juga bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas

pengambilan keputusan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Hidayat, 2025).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia, serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi transparansi digital, serta membahas bagaimana hal tersebut dapat membawa perubahan positif dalam akuntabilitas sektor publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran digital transparency dalam akuntansi sektor publik di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam praktik penyajian, akses, dan pemanfaatan informasi keuangan publik melalui sistem digital, bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik. Dibandingkan metode kuantitatif atau eksperimen, pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa konteks, interpretasi dokumen, dan pengalaman pengguna terhadap data publik yang kompleks.

Data yang dianalisis terdiri dari dokumen kebijakan, laporan keuangan, portal open government data, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur, dengan seleksi berdasarkan relevansi, kejelasan sumber, dan kontribusinya terhadap penelitian. Analisis data meliputi reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada empat aspek utama: aksesibilitas informasi, kelengkapan data, ketepatan waktu publikasi, dan kemudahan pemanfaatan data oleh masyarakat. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan, dengan membandingkan dokumen regulasi, laporan pemerintah, portal digital, dan kajian akademik.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai sejauh mana transparansi digital berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, serta memberikan dasar rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas data dan literasi pengguna di sektor publik.

HASIL dan PEMBAHASAN

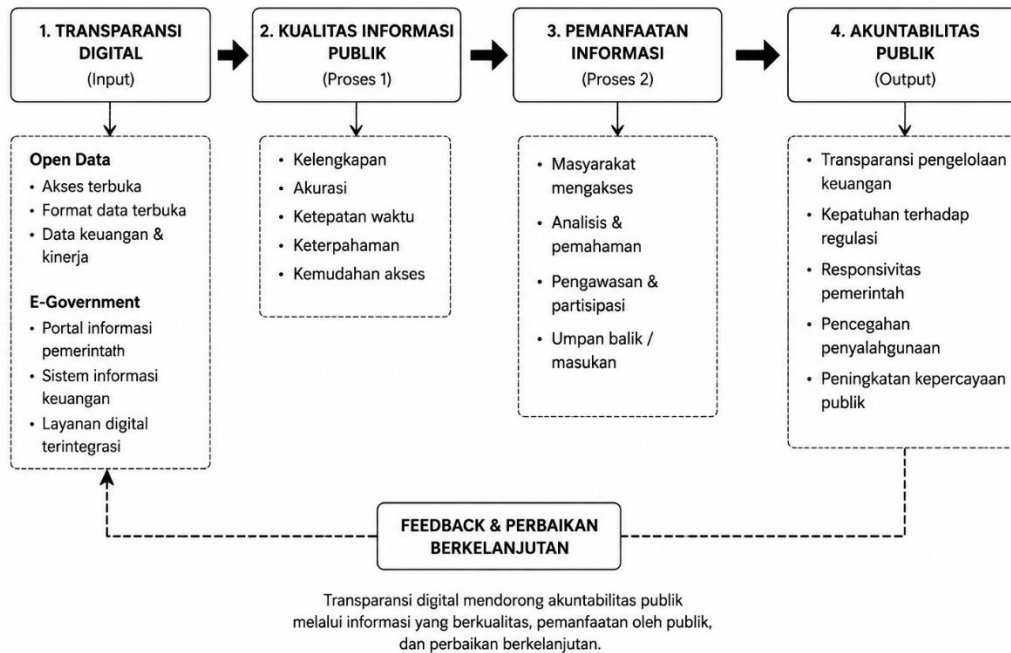
Penerapan transparansi digital dalam akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan kemajuan melalui kebijakan keterbukaan informasi, portal data terbuka, dan sistem informasi keuangan berbasis elektronik. Analisis terhadap empat aspek utama yaitu aksesibilitas informasi, kelengkapan data, ketepatan waktu publikasi, dan kemudahan pemanfaatan data menunjukkan perbedaan tingkat kemajuan. Aksesibilitas informasi tercatat paling tinggi, memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran, laporan keuangan, dan program pemerintah secara digital. Namun, kelengkapan data masih terbatas; beberapa laporan keuangan belum dilengkapi narasi kinerja atau penjelasan kontekstual, sehingga publik sering hanya melihat angka tanpa memahami efektivitas penggunaan dana. Ketepatan waktu publikasi umumnya mengikuti pola laporan formal tahunan atau pasca-audit, sedangkan kemudahan pemanfaatan data cukup baik, tetapi format digital belum sepenuhnya memudahkan analisis oleh publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi digital meningkatkan akses informasi, manfaat substantif untuk akuntabilitas publik masih perlu diperkuat.

Tabel 1. Hasil Analisis Transparansi Digital dalam Akuntansi Sektor Publik

Kategori	Penilaian	Sumber Data	Keterangan
Aksesibilitas Data	Tinggi	Portal Data Terbuka SIKD (DJPK, 2026) (djpk.kemenkeu.go.id)	Data dapat diakses melalui portal pemerintah
Kelengkapan Data	Sedang	LKPD PPID Pemerintah Daerah DKI Jakarta (PPID Jakarta, 2025) (ppid.jakarta.go.id)	Beberapa data tidak disertai penjelasan rinci
Ketepatan Waktu	Baik	Portal Data Terbuka SIKD (DJPK, 2026) (djpk.kemenkeu.go.id)	Data diperbarui setiap tahun
Kemudahan Penggunaan	Baik	Statistik Keuangan BPS (BPS, 2024) (bps.go.id)	Format data cukup mudah diolah oleh masyarakat

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan laporan data terbuka pemerintah (2025)

Berdasarkan Tabel 1, aspek aksesibilitas menunjukkan capaian paling kuat karena data keuangan publik telah tersedia melalui portal digital pemerintah. Namun, aspek kelengkapan masih berada pada tingkat sedang karena tidak semua data disertai metadata, narasi kinerja, atau penjelasan yang memadai. Ketepatan waktu publikasi menunjukkan kecenderungan baik, tetapi masih mengikuti siklus pelaporan formal sehingga belum sepenuhnya mendukung pengawasan yang bersifat cepat dan berkelanjutan. Sementara itu, kemudahan penggunaan data sudah cukup baik, meskipun format penyajian masih perlu ditingkatkan agar data lebih mudah dibandingkan, diolah, dan dianalisis oleh masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan data sektor publik telah meningkat, tetapi kualitas pemanfaatannya sebagai instrumen akuntabilitas masih membutuhkan penguatan.



Gambar 1. Diagram Alur Konseptual

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Diagram pada tabel 2 menekankan bahwa keberhasilan transparansi digital tidak hanya diukur dari ketersediaan data, tetapi juga dari kualitas, keterpahaman, dan kemampuan publik untuk memanfaatkan informasi guna mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Pembahasan

Analisis temuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi digital dalam akuntansi sektor publik di Indonesia telah meningkat, manfaat substantif bagi akuntabilitas publik masih terbatas. Data keuangan pemerintah yang tersedia secara digital sering memenuhi aspek formal, namun belum selalu disertai penjelasan kontekstual, narasi kinerja, atau indikator yang memudahkan masyarakat menilai efektivitas penggunaan anggaran (Ardiyani et al., 2021). Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara transparansi administrative publikasi data formal dan transparansi substantif, di mana informasi dapat digunakan untuk pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan publik.

Keterbatasan ini diperkuat oleh faktor-faktor kunci: kualitas data, integrasi sistem, dan kapasitas pengguna. Kualitas data mencakup akurasi, kelengkapan, konsistensi, serta keterbacaan informasi. Integrasi sistem penting agar berbagai sumber data tidak tersebar atau tumpang tindih, sehingga informasi dapat diakses dan dibandingkan secara konsisten. Sementara itu, literasi digital masyarakat dan aparatur menjadi kunci agar data yang tersedia dapat dipahami, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menilai kinerja pemerintah (United Nations, 2024). Tanpa kapasitas ini, keterbukaan data digital berpotensi menjadi transparansi semu, di mana ketersediaan data tidak diikuti pemanfaatan yang efektif.

Selain itu, ketepatan waktu publikasi data menjadi aspek kritis. Laporan keuangan umumnya dipublikasikan tahunan atau setelah proses audit selesai, sehingga pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran tidak selalu dapat dilakukan secara tepat waktu. Hal ini menekankan perlunya sistem digital yang responsif, terintegrasi, dan dapat menyajikan informasi mutakhir agar masyarakat dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara real-time (Santoso, 2025; Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2019).

Pembahasan ini juga menekankan peran open government data dan e-government sebagai instrumen digital governance. Open data memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara terbuka dan bebas, sedangkan e-government menyediakan platform integratif untuk penyajian data yang lebih mudah diolah dan dimanfaatkan (Setyarto et al., 2025; Hidayat, 2025). Kombinasi keduanya berpotensi meningkatkan partisipasi publik, pengawasan anggaran, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, efektivitas implementasi sangat tergantung pada struktur data, kualitas penyajian, dan kemampuan publik untuk menggunakan informasi secara kritis.

Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa digital transparency dalam akuntansi sektor publik di Indonesia telah bergerak ke arah yang positif, tetapi perlu penguatan pada beberapa aspek: penyajian data yang lebih lengkap dan kontekstual, integrasi sistem informasi yang lebih baik, peningkatan literasi digital pengguna, serta pemenuhan kebutuhan publik akan informasi yang relevan dan tepat waktu. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan digital transparency dalam akuntansi sektor publik Indonesia telah meningkatkan akses publik terhadap data keuangan melalui portal digital dan sistem informasi berbasis elektronik seperti SIKD dan portal data.go.id. Meskipun demikian, kualitas dan kelengkapan data masih perlu diperkuat, karena beberapa laporan belum dilengkapi narasi kinerja atau konteks yang memadai, sehingga efektivitas transparansi sebagai alat akuntabilitas publik belum optimal.

Temuan ini menegaskan pentingnya optimasi open government data dan e-government, baik dari sisi format, keterbacaan, maupun kemudahan akses, agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi ketidakmerataan kualitas data, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk mengatasinya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil diperlukan dalam program peningkatan literasi dan pemanfaatan data publik secara efektif.

Secara kontribusi teoretis, penelitian ini menambahkan perspektif baru pada literatur akuntansi sektor publik dengan menekankan bahwa transparansi digital bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi juga kualitas, keterbacaan, dan kegunaan data untuk pengawasan publik. Penelitian ini memperluas konsep digital governance dengan menunjukkan bagaimana integrasi open data dan e-government dapat memperkuat akuntabilitas substantif, bukan hanya administratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif bagi studi akuntansi sektor publik di era digital dan menegaskan bahwa pengelolaan data digital yang efektif dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat (Heald, 2006; Hidayat, 2025; Setyarto et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, A. R., Utami, E. R., Amanati, H. T., & Yusuf, A. M. (2021). Studi pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 178–189. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Heald, D. (2006). Transparency as an instrumental value. *Public Administration*, 84(4), 981-994.
- Hidayat, R. (2025). Digital governance and transparency: How open data initiatives enhance government accountability. *Journal of Governance & Regulation*, 14(3), 194–204. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i3art18>

- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *International Journal of Information Management*, 73, Article 102690. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- McGee, R., & Gaventa, J. (2021). Open data, civic engagement and accountability in the public sector. *Development in Practice*, 31(6), 765–778.
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2020). Agile innovation in government: A systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101480. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101480>
- Ndou, V., & Magutu, P. O. (2022). Assessing the maturity of open government data initiatives in public sector organizations. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101636. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101636>
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). *Exploring factors influencing digital transparency in local governments: Practices in Indonesia*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 11(2)
- OECD. (2019). *Open government data report*. Organization for Economic Cooperation and Development. <https://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm>
- Papachristou, E., & Gounopoulos, E. (2024). A systematic literature review of open government data: Assessing concepts, trends, and current research gaps. *AIP Conference Proceedings*, 3220(1), Article 030025. <https://doi.org/10.1063/5.0234826>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Sadat, A. S. (2025). Digital governance and civic inclusion to enhance public participation in political decision-making processes. *Frontiers in Political Science*, 7, Article 1671373. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1671373>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340.
- Santoso, I. A. P. (2025). *Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan*. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Setyarto, D. B., Alimuddin, A., Mulyaningsih, M., & Judijanto, L. (2025). The role of e-government in increasing transparency and accountability of public administration in the digital era. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 1771–1783. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4908>
- United Nations. (2024). *Digital government and transparency: The role of e-government in building open, accountable, and responsive government*. Retrieved from <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024>
- Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Dwivedi, Y. K. (2021). *Open data for public sector accountability: Challenges and opportunities*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-65660-0>